BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pembangunan Nasional mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional dibutuhkan sumber dana untuk merealisasikannya, sumber dana tersebut berasal dari penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah berasal dari pajak **(Waluyo Wiraman : 2003)**. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berupa tanah mempunyai nilai yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang semakin tinggi, sedangkan persediaan tanah terbatas. Objek PBB lainnya yang berupa bangunan, jumlahnya akan semakin meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan jumlah bangunan disebabkan bertambahnya jumlah penduduk, yang berarti bertambah pula kebutuhan akan tempat hunian **(Judisseno : 2001)**.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berupa tanah mempunyai nilai yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang semakin tinggi sedangkan persediaan tanah terbatas. Objek PBB lainnya yang berupa bangunan jumlahnya akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah bangunan disebabkan bertambahnya jumlah penduduk yang berarti bertambah pula kebutuhan akan tempat hunian **(Siti, R : 2004)**. Menyadari akan banyaknya jumlah obyek pajak maupun luasnya wilayah yang harus didata, maka diadakan pembentukan basis data yang mengacuke pola

SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees merupakan salah satu instansi dibawah Direktorat Jenderal Pajak yang menangani segala macam masalah perpajakan di sebagian daerah di kota Bandung. Sebagai upaya pelayanannya terhadap masyarakat, objek pajak Pajak Bumidan Bangunan (PBB) khususnya maka di KPP Pratama Bandung Karees diterapkan Sismiop yaitu suatu basis data yang akurat dan*up to date* dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB dalam suatu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat, dan efisien yang dikelola melalui suatu sistem **(Direktorat Jenderal Pajak : 2009)**.

Alur pengelolaan PBB di kantor pelayanan pajak dimulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak yang dilakukan melalui pendaftaran atau pendataan. Hasil dari pendaftaran dan pendataan terhadap objek dan subjek pajak merupakan informasi baik bersifat numerik maupun spasial yang sangat berguna dalam pengelolaan PBB. Keseluruhan pengelolaan PBB tersebut telah terintegrasi dalam suatu sistem informasi yang biasa dikenal dengan nama Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) **(Zain Mohammad : 2003)**. Inventarisasi sumber daya PBB pada hakekatnya merupakan survei dan investigasi terhadap segenap jenis objek dan cakupan wilayah tanah pemajakan, yang apabila disentuhkan dengan sistem penunjangnya akan mampu melahirkan desain potensi untuk peningkatan jumlah, luas, jenis objek dan subjek pajak yang mendekati keadaan sebenarnya dilapangan. Usaha tersebut berarti mengantarkan desain

potensi sumber daya PBB untuk dapat diproses lebih lanjut melalui intensifikas, ekstensifikasi dan pemeliharaan data objek dan subjek PBB **(Tika, P:2004)**.

Untuk memperoleh hasil yang optimal, diperlukan sistem penunjang berupa sinergi dari pengaruh hubungan timbal balik antara sumber daya manusia, sumber daya PBB dan sumber daya ilmu dan tekhnologi. Apabila sistem penunjangnya berfungsi dengan baik, maka hasil dari interaksi dari ketiganya dapat melahirkan desain potensi yang prima, untuk kemudian diolah menjadi data objek dan subjek pajak yang akurat. Inventarisasi sumber daya PBB harus selalu dilandasi pemikiran optimalisasi pemanfaatan segenap potensi yang terdapat dalam wilayah yang bersangkutan menuju posisi kesiapan untuk dilakukan pendataan dan penilaian. Pemeliharaan data dilakukan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan **(Winarno : 2000)**.

Dalam operasionalisasinya di kantor pelayanan pajak inventarisasi sumber daya PBB memerlukan kelompok kerja yang secara khusus bertugas mengadakan inventarisasi dan evaluasi terhadap segenap sumber daya PBB bagi kebijaksanaan pengelolaan dan pemanfaatannya. Kelompok kerja tersebut berfungsi menghubungkan aspek penyedian data dan informasi dengan aspek perumusan kebijaksanaan melalui unsur yang bertanggung jawab dan mampu menerjemahkan seleksi yang bersifat menyeluruh kedalam faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pengumpulan harga jual tanah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan, progesifitas NJKP sesuai dengan pemanfaatan objek PBB **(Masri, S : 2003)**.

Peta dasar PBB atau peta sejenis yang di pakai di Kantor Pelayanan Pajak dapat didefinisikan sebagai media komunikasi dan tulang punggung pengembangan PBB tingkat primer yang lebih mapan dan perlu dimonitor agar lebih memadai untuk program jangka panjang dalam menghadapi era reformasi. Arah perkembangan sistem informasi disinyalir akan mengikuti pola awal berupa interaksi data alfanumeris dalam sistem manajemen informasi pajak (PBB, PPN dan BPHTB) terutama di kantor pelayanan pajak, kemudian interelasi dan grafis dengan data alfanumeris dalam sistem informasi PBB dan pada akhirnya menjadi interpedensi antara sistem informasi yang bertumpu pada data grafis (spasial) dan data alfanumeris dari instansi terkait **(Suparlan : 2006).**

Peta (data spasial) harus disiapkan agar sewaktu-waktu dalam jumlah dan mutu tertentu dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan, perencanaan, pengendalian, pemungutan dan penerimaan pada semua jenis objek pajak. Peta hakekatnya sangat diperlukan sebagai alat komunikasi PBB yang bersifat strategis, taktis dan operasional dalam pendataan PBB yang berwawaskan penerimaan Negara **(Muttaqin, Z : 2004)**. Peta-peta yang khusus berhubungan dengan pengelolaan PBB terdiri dari peta Zona Nilai Tanah (ZNT) dan peta blok. Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan suatu peta yang menggambarkan informasi mengenai nilai-nilai tanah yang ada dalam suatu kelurahan atau desa yang terbagi atas beberapa zona nilai tanah. Dengan melihat peta ini seorang wajib pajak misalnya dapat mengetahui berapa nilai tanah permeter persegi didaerahnya dan mencocokannya dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB **(Undang-Undang No.12 Tahun 1985)**.

Dalam hal jumlah objek pajak yang sangat besar dan semakin pentingnya kedudukan NJOP sebagai acuan dalam berbagai jenis kegiatan khususnya yang berkaitan dengan akurasi data objek pajak, maka dibuat sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan semua informasi tentang objek dan subjek pajak. Di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sendiri sejak tahun 1992 telah mengaplikasikan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Di mana SISMIOP tersebut merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB.

Keberadaan SISMIOP diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem perpajakan di masa mendatang yang membutuhkan keakuratan, kecepatan, keefektifan, dan keefisianan. Untuk itu di dalam SISMIOP program komputer dimasukkan ke dalam salah satu unsur pokoknya **(Rochmat, S :2001)**. SISMIOP memiliki kelemahan yaitu tidak dapat memvisualisasikan data spasial objek pajak. Untuk itu dibuat sebuah sistem yang terintegrasi ke dalam SISMIOP yang dapat membantu untuk melakukan analisis data spasial. Sistem tersebut adalah Sistem Informasi Geografi (SIG) PBB yang sejak diaplikasikan pertama kali terus dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai maksud dan tujuannya sebagai sistem yang dapat membantu mengambil kebijakan. Salah satu pamanfaatannya adalah pembuatan informasi rinci objek pajak **(Munawir : 2003)**.

Pemanfaatan informasi rinci objek pajak untuk ekstensifikasi dimungkinkan dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pemutakhiran basis data SISMIOP sehingga tidak menyalahi ketentuan yang ada, karena dalam pemungutan PBB

berlaku prinsip *self assessment* dimana pemberian kepercayaan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada subjek pajak untuk mendaftarkan dan melaporkan objek PBB dengan menggunakan SPOP. Jika subjek pajak belum atau tidak mendaftarkan objek pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan kegiatan pembentukan dan pemeliharaan basis data **(Kartasapoetra: 2008)**. Mengingat adanya kegiatan ekstensifikasi di bidang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan berkaitan dengan SISMIOP, penulis bermaksud mengangkat tema tersebut menjadi pokok bahasan pada laporan Kerja Praktek. Adapun judul laporan Kerja Praktek yang akan disusun adalah **"TINJAUAN TERHADAP KEGIATAN EKSTENSIFIKASI OBJEK PBB DENGAN MENGGUNAKAN SISMIOP dan SIG DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDUNG KAREES"**.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Praktek ini adalah:

1. Mengetahui kegiatan ekstensifikasi objek PBB dengan menggunakan SISMIOP dan SIG di KPP Pratama Bandung Karees
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dengan menggunakan SISMIOP dan SIG di KPP Pratama Bandung Karees

3. Memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap hambatan-hambatan yang dialami oleh KPP Pratama Karees dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dengan menggunakan SISMIOP dan SIG.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1. Kegunaan Bagi KPP Pratama Bandung Karees

   Secara tidak langsung KPP Pratama BandungKarees menginformasikan kepada publik fungsi sistem yang dipakai terhadap para siswa maupun mahasiswa yang magang, Selain itu pihak KPP sedikitnya merasa terbantu dan dapat mempercepat proses pengerjaannya.

2. Kegunaan Bagi Penulis

   Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan mengenai tinjauan terhadap terhadap kegiatan ekstensifikasi objek PBB dengan menggunakan program SISMIOP dan SIG, juga merupakan proses pembelajaran dalam berdisiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan.

3. Kegunaan Bagi Pihak Lain

   Dapat dijadikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai ekstensifikasi objek PBB dan dapat menjadi referensi, khususnya bagi pihak yang memerlukan.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam menyusun dan menyelesaikan tugas Kerja Praktek ini penulis menggunakan metode *Block Release*, yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan pada waktu tertentu dalam waktu satu bulan.

Adapun cara dalam pengumpulan data dan informasi sebagai bahan sebagai bahan pendukung dalam penyajian laporan ini adalah:

1. *Field Research* (Penelitian Secara Langsung)
    a. Observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pencarian dan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan penelitian tentang kegiatan-kegiatan yang terjadi pada suatu perusahaan.
    b. Interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk diwawancarai sehingga data-data yang diperlukan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang akan dibahas.
2. *Library Research* (Studi Pustaka)

    Study Literatur, yaitu teknik pengumpulan data yang ada dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kerja Praktek pada KPP PRATAMA BANDUNG KAREES yang berlokasi di Jalan Ibrahim Adji No.372 Bandung Jawa Barat Telp. (022) 7333180. Pelaksanaan Kerja Praktek dimulai pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011, dengan jam kerja:

Senin-Jum'at : Pukul 07.30 – 16.00

Sabtu dan Minggu : Libur